

Dampak Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Pengentasan Kemiskinan dan Penyediaan Layanan Umum: Studi Kasus Kabupaten Sukabumi, Indonesia

Mulus Wijaya Kusuma

Universitas Nusa Putra

Abstract: *Corporate social responsibility (CSR) phenomena in developing countries are different from that of developed countries in terms of governments' intermediary roles in the delivery mechanisms of CSR activities, especially for overcoming poverty and poor public services. By extracting Polanyi's general principles of behavior regarding resource allocation, the distinctive CSR phenomenon in developing countries could be explained by the concept of quasi-redistribution. Considering the common character of quasi-redistribution due to its weak government system, the intermediary roles of the governments in Indonesia are noticeable due to the issuance of regulations at national and local governmental levels directing companies' CSR activities to address poverty and poor basic public service issues. In the case of Sukabumi Regency, where the poverty and poor basic public services are the main issues, the actual role of local government in promoting company contributions to address these issues through CSR activities to alleviate poverty and provide public services is indeed increasing and developing. This paper illuminates how the intermediary roles of governments exist in CSR activities so that they alleviate poverty and provide basic public services.*

Keywords: *Corporate social responsibility, developing country, quasi-redistribution.*

Abstrak: Fenomena tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di negara berkembang berbeda dengan di negara maju dalam hal peran intermediasi pemerintah dalam mekanisme pelaksanaan kegiatan CSR, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan pelayanan publik yang buruk. Dengan mengekstraksi prinsip umum perilaku Polanyi terkait alokasi sumber daya, CSR yang khas Fenomena di negara berkembang dapat dijelaskan dengan konsep quasi-redistribusi. Mempertimbangkan karakter umum quasi-redistribusi karena sistem pemerintahannya yang lemah, peran perantara pemerintah di Indonesia terlihat karena dikeluarkannya peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang mengarahkan kegiatan CSR perusahaan untuk mengatasi kemiskinan dan masalah pelayanan publik dasar yang buruk. Dalam kasus Kabupaten Sukabumi, di mana kemiskinan dan pelayanan dasar publik yang buruk menjadi masalah utama, peran nyata pemerintah daerah dalam mendorong kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah ini melalui kegiatan CSR mengentaskan kemiskinan dan memberikan pelayanan publik memang semakin meningkat dan berkembang. Penelitian ini menjelaskan bagaimana perantara peran pemerintah ada dalam kegiatan CSR sehingga mereka mengentaskan kemiskinan dan menyediakan layanan publik dasar.

Kata Kunci: *Tanggung jawab sosial perusahaan, negara berkembang, kuasi-redistribusi.*

* Corresponding author's e-mail: mulus.wijaya@nusaputra.ac.id

ISSN: 2686-4789 (Print); ISSN: 2686-0473 (Online)

<http://bisnisan.nusaputra.ac.id>

PENDAHULUAN

Fenomena CSR di negara berkembang berbeda dengan negara maju dalam hal peran intermediasi pemerintah dalam mekanisme penyampaian kegiatan CSR, terutama untuk mengatasi kemiskinan dan pelayanan publik yang buruk (Kusuma 2018).

Dengan mengekstrak prinsip umum perilaku Polanyi mengenai alokasi sumber daya, fenomena CSR yang khas di negara berkembang dapat dijelaskan dengan: konsep “quasi-redistribusi” yang dipahami sebagai mekanisme perantara pemerintah untuk mendorong CSR perusahaan (mempromosikan CSR tanpa memaksakan kemampuannya) terhadap kegiatan yang bersinggungan dengan fungsi redistribusi pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan publik dasar untuk warga negara.

Mengingat sifat umum dari quasi-redistribusi karena sistem pemerintahannya yang lemah, maka Peran intermediasi pemerintah di Indonesia terlihat dengan dikeluarkannya peraturan di tingkat nasional dan tingkat pemerintah daerah yang mengarahkan kegiatan CSR perusahaan untuk mengatasi kemiskinan dan masyarakat dasar yang miskin masalah layanan. Meskipun secara terminologi, “regulasi” biasanya menyiratkan pemaksaan kekuasaan, fakta bahwa semua peraturan negara bergantung pada kesukarelaan perusahaan dan inisiatif mendustakan fungsi promosinya untuk meningkatkan kesadaran perusahaan akan CSR dan mendorong mereka untuk mengatasi masalah masyarakat setempat (Program 2020).

Dalam kasus Kabupaten Sukabumi, di mana kemiskinan dan buruknya pelayanan dasar publik menjadi isu utama,

peran nyata pemerintah daerah dalam mendorong kontribusi perusahaan untuk mengatasi masalah ini melalui CSR kegiatan pengentasan kemiskinan dan pemberian pelayanan publik memang semakin meningkat dan berkembang (Anon 2019).

Kegiatan CSR dapat meningkatkan dampaknya dan sekaligus memenuhi tujuan pembangunan yang diberikan kerjasama dengan mitra publik, seperti lembaga pemerintah (Soplop et al. 2009). Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana peran intermediasi pemerintah ada dalam kegiatan CSR sehingga mereka mengentaskan kemiskinan dan menyediakan layanan publik dasar.

Kegiatan CSR dari empat perusahaan di wilayah tersebut dipilih sebagai fokus tulisan ini. Mereka adalah PT. Bio Farma (Badan Usaha Milik Negara [BUMN] yang memproduksi obat dan vaksin), PT. Amerta Indah Otsuka perusahaan swasta yang memproduksi minuman), PT. Aqua Golden Mississippi (perusahaan swasta yang memproduksi air mineral), dan PT. Chevron Geothermal Salak (perusahaan swasta yang mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi). Kegiatan CSR perusahaan-perusahaan ini merupakan contoh yang representatif dari kegiatan CSR di Indonesia dan negara berkembang lainnya. Pertama, ada peran pemerintah dalam pelaksanaannya, baik lokal maupun nasional agensi pemerintahan. Peran-peran ini menggambarkan karakter umum dari fungsi quasi-redistribusi dari pemerintah di Indonesia dan negara berkembang lainnya dalam kegiatan CSR. Kedua, kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini mengatasi kemiskinan atau masalah layanan publik dasar yang buruk.

Kegiatan ini yang menonjol praktik CSR di Indonesia dan negara berkembang lainnya.

TINJAUAN LITERATUR

CSR (Corporate Social Responsibility)

Corporate social responsibility adalah tentang nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan komitmen dunia usaha untuk bertindak secara etis, beroprasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas. CSR merupakan proses bisnis yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mengendalikan resiko dan tanggung jawab sosial (Nayenggita, Raharjo, and Resnawaty 2019).

Terdapat dua jenis konsep CSR, yaitu dalam pengertian luas dan dalam pengertian sempit. CSR dalam pengertian luas, berkaitan erat dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (sustainable economic activity). Keberlanjutan kegiatan ekonomi bukan hanya terkait soal tanggungjawab sosial tetapi juga menyangkut akuntabilitas (accountability) perusahaan terhadap masyarakat dan bangsa serta dunia internasional.

CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (stake-holders) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (sustainability) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu merupakan komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Widjaja & Yani, 2006). Menurut UUPT 2007 pengertian CSR dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tang-gungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Menurut Arsyad (2010:300), kemiskinan dapat terjadi karena anggota masyarakat tidak atau belum berpartisipasi dalam proses perubahan yang disebabkan ketidakmampuan dalam kepemilikan faktor produksi atau kualitas yang kurang memadai. Sementara menurut Sen dalam Todaro dan Smith (2006: 23), kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat

yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut.

Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

1. PT. Bio Farma

PT. Bio Farma adalah BUMN yang memproduksi obat dan vaksin.¹ Perusahaan berlokasi di Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat yang berjarak sekitar 80 km dari Kabupaten Sukabumi. Bagaimana perusahaan ini melakukan kegiatan CSR di Kabupaten Sukabumi dipicu oleh merebaknya virus herpes koi di Indonesia, termasuk di Kabupaten.

2. PT. Amerta Indah Otsuka

PT. Amerta Indah Otsuka adalah perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical Japan. Perusahaan memiliki dua pabrik di Indonesia yang salah satunya berada di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2004, Sebagai perusahaan minuman yang mengandalkan sumber daya air, lokasi pabrik berada dekat daerah resapan air Taman Nasional Halimun Salak, gunung terbesar di Pulau Jawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Kegiatan CSR*

a) PT. Bio Farma

PT. Bio Farma adalah BUMN yang memproduksi obat dan vaksin.¹ Perusahaan berlokasi di Bandung, ibu kota Provinsi Jawa

Barat yang berjarak sekitar 80 km dari Kabupaten Sukabumi. Bagaimana perusahaan ini melakukan kegiatan CSR di Kabupaten Sukabumi dipicu oleh merebaknya virus herpes koi di Indonesia, termasuk di Kabupaten.

Budidaya ikan koi merupakan mata pencaharian utama warga Desa Sukamulya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi. Hingga tahun 2002, daerah ini dikenal sebagai salah satu penghasil utama ikan Koi di Indonesia. Usaha ini bangkrut akibat mewabahnya virus herpes koi di tanah air. Penyakit itu diperkirakan menyebar melalui impor ikan Koi dari Hongkong. Diyakini bahwa metode pertanian tradisional menyebabkan penyakit ini mudah menyebar sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi warga Desa Sukamulya. Sejak itu, banyak penduduk desa beralih pekerjaan mereka ke kegiatan pertanian tradisional yang menghasilkan pendapatan sederhana.

Untuk membangun kembali budidaya ikan koi di desa agar warga bisa mendapatkan kembali pendapatan yang lebih tinggi, Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi membawa masalah ini ke pemerintah provinsi yaitu ke Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perikanan Provinsi, diilustrasikan pada Gambar 1, menyampaikan proposal ke PT. Bio Farma. Karena perusahaan memproduksi vaksin, itu dianggap memiliki kemampuan

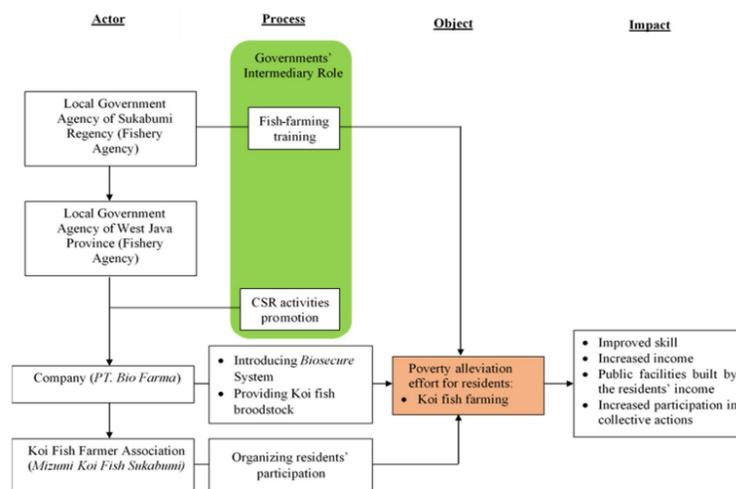
untuk memberikan solusi terhadap masalah koi herpesvirus. Selain itu, mengingat peraturan bahwa BUMN wajib mengalokasikan hingga 4% dari laba bersih tahun sebelumnya untuk CSR, usulan tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui kegiatan CSR-nya.

Usulan tersebut ditindaklanjuti perseroan untuk menjalankan amanat UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN. UU tersebut mengamanatkan BUMN untuk membina usaha kecil, koperasi, dan masyarakat sekitar, dan mendorong BUMN menjadi panutan bagi perusahaan lain dalam menunjukkan kegiatan CSR untuk pengentasan kemiskinan.

Perusahaan memperkenalkan Sistem *Biosecure* untuk menghidupkan kembali bisnis budidaya ikan Koi di wilayahnya.

Sistem ini biasanya didefinisikan sebagai prosedur untuk mencegah transmisi dan transfer bakteri atau virus antar makhluk hidup dan diimplementasikan dalam proses produksi vaksin. Perusahaan menerapkan sistem ini pada tahun 2010 untuk mencegah penyebaran virus herpes koi.

Untuk membuat pelaksanaan proyek lebih efektif, perusahaan bekerja sama dengan asosiasi lokal pembudidaya ikan koi di desa Mizumi Ikan Koi Sukabumi mengorganisir partisipasi warga. Perusahaan itu memperkenalkan Sistem *Biosecure* kepada sekitar 40 penduduk sebelum mengimpor sekitar 18 Koi. berkualitas tinggi indukan dari Niigata-Jepang. Secara kolektif, warga melakukan penangkaran Koi dengan menerapkan sistem tersebut. Secara bersamaan, Dinas Perikanan Sukabumi memberikan pelatihan sistem budidaya yang baik.



Gambar 1. Kegiatan CSR PT. Bio Farma untuk pengentasan kemiskinan

Harapan nya, proyek ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan warga dalam budidaya ikan Koi sehingga desa ini dapat kembali meraih kejayaannya sebagai salah satu penghasil utama ikan koi di Indonesia, sebuah prestasi yang tercermin dari pendapatan warga. Setiap tiga bulan siklus usaha, setiap warga yang ikut mengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar rata-rata 20.500.000 Rupiah dari penjualan ikan Koi. pendapatannya mencapai sekitar 228.000 Rupiah per hari. Ternyata, kegiatan tersebut bisa membangkitkan semangat warga. pendapatan jauh di atas garis kemiskinan (di atas 28.000 Rupiah atau USD 2 per hari).

Dengan kondisi ekonomi yang membaik ini, warga berkomitmen menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membangun dan meningkatkan fasilitas umum desa. Ada pembangunan sekolah yang dibiayai sendiri oleh warga. Tampaknya kegiatan tersebut telah menunjukkan respon positif warga terhadap aksi kolektif untuk membangun desanya.

b) PT. Amerta Indah Otsuka

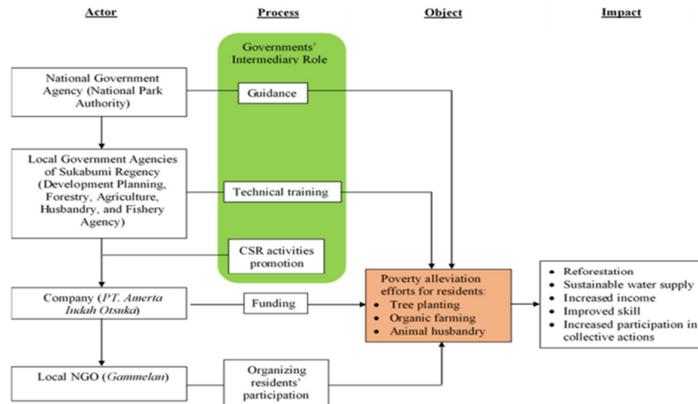
PT. Amerta Indah Otsuka adalah perusahaan afiliasi dari Otsuka Pharmaceutical Japan. Perusahaan memiliki dua pabrik di Indonesia yang salah satunya berada di Desa Kutajaya, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2004, Sebagai perusahaan minuman yang mengandalkan sumber daya air, lokasi pabrik berada dekat daerah resapan air

Taman Nasional Halimun Salak, gunung terbesar di Pulau Jawa.

Banyak penduduk desa yang tergolong rumah tangga miskin yang mengandalkan sumber daya taman nasional sumber daya untuk hidup, artinya interaksi mereka dengan taman nasional tinggi. Kegiatan mata pencaharian mereka dan pertumbuhan penduduk desa telah menyebabkan deforestasi taman nasional. Dalam jangka panjang, ini kondisi tersebut dapat mengancam kelestariannya. Gambar 2 mengilustrasikan bagaimana masalah ini ditangani melalui kegiatan CSR perusahaan yang melibatkan berbagai pihak.

Kewenangan taman nasional, 7 fungsi utamanya adalah konservasi taman, menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah kemiskinan karena upaya peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan fungsi dan tanggung jawab pemerintah daerah. Dengan meningkatkan kesejahteraan warga, diharapkan ketergantungan pada sumber daya hutan untuk hidup dapat dikurangi sehingga deforestasi tidak berlanjut. Menanggapi permintaan tersebut, Dinas Kehutanan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pemerintah memprakarsai sebuah proyek bernama Kampung Konservasi (Desa Konservasi). Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi ekonomi warga desa dan melestarikan taman secara bersamaan. Pemerintah daerah diusulkan PT. Amerta Indah Otsuka untuk berpartisipasi dalam

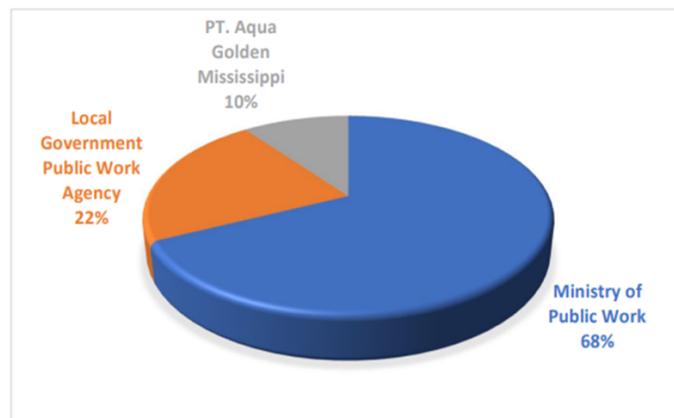
proyek tersebut melalui kegiatan CSR-nya.



Gambar 2. Kegiatan CSR PT. Aqua Golden Mississippi untuk penyediaan layanan publik dasar

Untuk merealisasikan proyek senilai Rp 2,95 miliar itu, masing-masing pihak berkomitmen untuk memberikan kontribusi pendanaan secara proporsional, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4. Kementerian Pekerjaan Umum memberikan tentang 68% anggaran—dua miliar Rupiah—untuk perpipaan air. Pekerjaan

umum pemerintah daerah Badan itu sendiri menyiapkan sekitar 22% dari anggaran—650 juta Rupiah untuk membangun waduk, intake, tangki pelepas tekanan, jembatan pipa, dan tangki distribusi. Sementara itu, PT. Aqua Golden Mississippi mendukung sekitar 10% dari anggaran proyek 300 juta Rupiah untuk memasang meteran air.



Gambar 3. Sumber pendanaan proyek penyediaan air bersih untuk Desa Nangerang

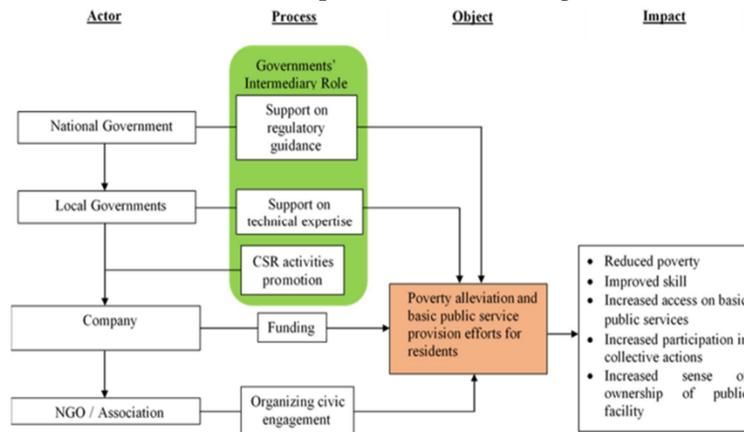
Kegiatan CSR PT. Bio Farma dan PT. Amerta Indah Otsuka telah menunjukkan dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan.

Peningkatan pendapatan penerima manfaat di atas garis kemiskinan merupakan hasil terukur dari kegiatan kedua perusahaan. Satu hal

yang perlu diperhatikan tentang PT. Bio Farma sebagai BUMN telah mewakili niat pemerintah nasional sebagaimana diatur oleh undang-undang untuk menjadi panutan bagi perusahaan lain dalam menunjukkan CSR kegiatan pengentasan kemiskinan.

Seperti diilustrasikan pada Gambar 6, pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan telah memberikan fungsi quasi-redistribusi pemerintah yang tertanam dalam kegiatan. Peran perantara pemerintah dalam mempromosikan CSR terhadap

kegiatan yang bersinggungan dengan fungsi redistribusi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan publik dasar mempercepat kegiatan CSR yang menangani masalah ini. Dalam hal upaya pengentasan kemiskinan, dukungan yang diberikan oleh instansi pemerintah semakin tinggi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan warga desa untuk mengatasi kesulitan teknis untuk mempertahankan mata pencaharian kegiatan.



Gambar 4. Model kegiatan CSR untuk pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan publik dasar di Kabupaten Sukabumi

Dalam hal fasilitas umum untuk mengakses pelayanan publik utama, karena banyak warga yang melakukan pembangunan fasilitas itu sendiri, mereka mempunyai rasa memiliki fasilitas yang mendorong mereka untuk mempertahankannya agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Peningkatan partisipasi dalam kegiatan publik dan rasa memiliki fasilitas publik mencerminkan meningkatkan modal sosial penduduk terhadap pembangunan (Mattessich, 2015).

Sikap positif ini sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penyediaan layanan publik dasar.

KESIMPULAN

Kondisi kehidupan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan di Kabupaten Sukabumi yang di bawah standar, baik ekonomi dan sosial yang digambarkan oleh kemiskinan dan belum terpenuhinya pelayanan dasar publik bagi warga, telah menginisiasi kegiatan CSR yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan warga.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh berbagai perusahaan telah mengatasi kemiskinan dan layanan publik dasar yang buruk masalah. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan praktik CSR yang menonjol di negara-negara berkembang. Karena keterbatasan anggaran dalam menjalankan fungsi redistribusinya, pemerintah harus ikut mengambil peran dalam pelaksanaan CSR.

Kegiatan diarahkan oleh instansi pemerintah daerah atau nasional instansi pemerintah terhadap masalah yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Peran-peran ini menggambarkan karakter umum dari fungsi quasi-redistribusi pemerintah di negara-negara berkembang pada kegiatan CSR. Kegiatan CSR di Kabupaten Sukabumi telah memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskinan dan masyarakat umum, penyediaan layanan bagi penduduk di wilayah tersebut melalui kerjasama antara perusahaan, instansi pemerintah, LSM, dan warga itu sendiri dalam pelaksanaannya. Bagi BUMN, upaya perusahaan telah mewakili niat pemerintah untuk mendorong mereka menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam menunjukkan kegiatan CSR untuk pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif membangun modal sosial warga desa, termasuk keterlibatan masyarakat dan rasa kepemilikan fasilitas publik. Modal sosial ini sangat diperlukan

sebagai syarat awal untuk pengentasan kemiskinan lebih lanjut dan upaya penyediaan layanan publik dasar. Pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan mencerminkan hubungan antar pemerintah antara pemerintah nasional, provinsi, dan lokal untuk mempromosikan dan mendukung kegiatan CSR untuk pengentasan kemiskinan dan ketentuan pelayanan primer publik.

Seperti yang diamanatkan oleh peraturan nasional, forum CSR di tingkat nasional, provinsi, dan pemerintah daerah telah dibentuk untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan kegiatan CSR. Koordinasi dan kerjasama antar seluruh jajaran pemerintahan dapat dilakukan melalui forum-forum tersebut sehingga semua potensi sumber daya dari instansi pemerintah terkait dapat disinergikan untuk mendukung kegiatan CSR.

Namun, koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah untuk memfasilitasi terlaksananya kegiatan CSR perusahaan belum terjadi melalui forum-forum tersebut. Ke depan, sinergi yang lebih baik dari peran pemerintah dalam memfasilitasi kegiatan CSR perusahaan akan memiliki dampak yang jauh lebih signifikan terhadap pengentasan kemiskinan dan upaya penyediaan layanan publik dasar.

REFERENSI

- Anon. 2019. "The Impact of Corporate Social Responsibility for Poverty Alleviation and Basic Public Services Provision The Case of Sukabumi Regency , Indonesia Mulus Wijaya Kusuma." *The Impact of Corporate Social Responsibility for Poverty Alleviation and Basic Public Services Provision The Case of Sukabumi Regency , Indonesia Mulus Wijaya Kusuma* 2-5.
- Edi, A. C. (2014). Cross-sector Partnerships Models in Corporate Social Responsibility to Implement Poverty Reduction Initiatives in Indonesia. *International Journal of Administrative Science & Organization* Vol.21 No.2, 128-136.
- Ghani, M. A., Sirojuzilam, Badaruddin, & Rujiman. (2015). The Influence of Corporate Social Responsibility towards

- the Development of the Rural Communities: Case Studies in North Sumatera, Republic of Indonesia. *International Journal of Regional Development* Vol.2 No.2, 12-26
- Kusuma, M. W. (2018). Corporate Social Responsibility: Concepts and Practices in Indonesia. *Journal of Policy Science* Vol. 26 No. 1, 137-148.
- Kusuma, M. W. (2019). Drivers of Corporate Social Responsibility in Indonesia. *Journal of Regional Information and Development* Vol. 8, 70-82.
- Kusuma, M. W. (2020). Corporate Social Responsibility for Poverty and Basic Public Services in Indonesia Case Study: Sukabumi Regency. *Journal of Policy Science* Vol. 27 No. 2
- Mattessich, P. (2015). Social Capital and Community Building. In R. Phillips, & R. H. Pittman, *An Introduction to Community Development*, Second Edition (pp. 57-71). New York and London: Routledge.
- Mujiati, and Nuraini Aisyah. 2014. "Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria Di Kabupaten Boyolali." *Bhumi* 13(39):35-42.
- Nayenggita, Gina Bunga, Santoso Tri Raharjo, and Risna Resnawaty. 2019. "Praktik Corporate Social Responsibility (Csr) Di Indonesia." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2(1):61. doi: 10.24198/focus.v2i1.23119.
- Program, Doctoral. 2020. "MULUS Wijaya Kusuma." (March).
- Soplop, Julia C., Anna Wetterberg, Ignatius Indriartoto, María José, De León Pellecer, Tere Ligorria Goicolea, and Manuel A. Roman-lacayo. 2009. "Increasing Development Impact : Channeling Corporate Social Responsibility Funds Through Public-Private Partnerships." *Development* (September). doi: 10.3768/rtipress.2009.OP-0002.0909.